

Konstruksi Perempuan Dalam Budaya Melayu (Studi Terhadap Perempuan Pengusaha UKM Di Kota Palembang : Pendekatan Ekonomi Dan Agama)

Juwita Anggraini

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

email : juwita_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

This study discusses the Construction of Malay Woman Entrepreneurs. This research departs from the beginning of Malay Women with qualities such as self-satisfaction, lack of full, inefficient in doing things, lack of respect for time, lack of imagination and less persistent in effort. Tabrani further describes this ethnic decline caused by their characteristic that can be formulated: (1) the ability to compete in this tribe is very small, (2) Poverty is a common food, (3) Shadow of lack of quality food, replace the peat land blocking rice crops to flourish, (4) satisfaction towards the results achieved and strongly bound family groups that are difficult to develop, and (5) educational patterns that do not lead them to lead generation Problem formulation of the Women's Construction in Malay Culture on Women Entrepreneurs. Data Source is the primary source of results from interviews with some narasumber. Secondary sources are examined from the data of books relating to Women and Construction The results of this study review the values of Malay women entrepreneurs ie, diligent in running a business, have a good time management, high creativity in product development in the right. In the division of gender roles, it is seen that Malay women have no significant advantages in performing their role both as mother and wife as well as a businessman. All benefits in the division of labor are addressed wisely. Among them are caregivers at the same place in business, division of domestic role with husband and so forth. In women's capacity building and business development, Malay women mostly perform their capacities by participating in government programs and self-reliant institutions. With the development of capacity, it is easy for Malay women to formulate stratehi of business development.

Keywords: Women Enterpreneurs, Gender, Religion and Culture

Pendahuluan

Wanita yang terlibat dalam industri rumah tangga, pada umumnya berasal dari rumah tangga miskin. Bekerja menjadi suatu strategi menghadapi tekanan ekonomi dan sekaligus mewujudkan bertanggung jawab terhadap kelangsungan ekonomi

rumahtangganya. Ideologi *of women secondary work* yang berasumsi bahwa wanita yang terlibat dalam bidang ekonomi hanya sekedar untuk memperoleh tambahan saku untuk dinikmati sendiri tidaklah benar. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan yang diperoleh wanita dalam bentuk tunai, sangatlah penting karena dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan dapur sehari-hari. Apapun anggapan orang penghasilan wanita adalah sangat berarti, karena dipakai membiayai kebutuhan konsumsi sehari-hari yang tidak bisa ditunda (Abdullah, 2006).

Dari beberapa penelitian Pusat Penelitian Kependudukan UGM ditunjukkan bahwa sumbangan wanita bekerja yang menggeluti industri rumah tangga antara lain di Sulawesi Selatan 17 persen, Irian Jaya 47 persen, Sumatera Selatan 40 persen, D.I 44,7 Persen, , Jawa Barat 39 persen, Bali 22,9 persen dan Sumatera Barat 23 persen. Penelitian tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa tanpa sumbangan wanita, maka 75 persen rumah tangga di daerah penelitian termasuk berada di bawah garis kemiskinan. Karena keterlibatan wanita, maka jumlah rumah tangga yang di bawah garis kemiskinan tinggal 41,3 persen saja (Nasikun, 2011).

Besarnya kontribusi perempuan terhadap perekonomian masyarakat bahkan Negara hal ini menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam bekerja untuk mencari nafkah terjadi karena dorongan kebutuhan, kemauan dan kemampuan serta kesempatan kerja yang tersedia dan akses wanita atas kesempatan tersebut. Status ekonomi wanita dilihat dari aktivitasnya dalam kegiatan mencari nafkah, akses terhadap faktor produksi, tingkat pendapatan yang dihasilkan dan kontribusinya terhadap pendapatan keluarga (Dipta, 2009).

Studi yang mengkaji kaitan antara wanita dan kebudayaan merupakan kajian yang menarik. Seperti penelitian yang mengkaji klasifikasi yang muncul dalam masyarakat Jawa menunjukkan bahwa keterlibatan wanita dalam sector ekonomi. Mereka telah terjun ke sector ekonomi cukup lama, sehingga secara kultur –dalam system pengetahuan mereka- telah tercipta klasifikasi tentang pendapatan dalam rumah tangga. Wanita Jawa pada dasarnya memegang tanggung jawab terhadap dunia social dan material, tidak dapat diisolasi dari lingkungan social dan ekonomi. Menurut konsep *ibuisme*, wanita sebagai ibu rumah tangga tidak terbatas hanya pada urusan keluarganya, tetapi juga menyangkut kegiatan di segala bidang diluar rumah tangga.

Melihat dari berbagai kajian diatas maka dapat dipahami bahwa konstruksi perempuan disetiap budaya berbeda. Hal tersebut disebabkan karena budaya memang mengacu pada perilaku yang dipelajari yang menjadi karakter cara hidup secara total dari anggota suatu masyarakat tertentu. Kultur atau budaya terdiri dari nilai-nilai umum yang dipegang dalam suatu kelompok manusia; merupakan satu set norma, kebiasaan, nilai dan asumsi- asumsi yang mengarahkan perilaku kelompok tersebut. Kultur juga mempengaruhi nilai dan keyakinan (*belief*) (Mangunsong, 2004).

Perempuan Melayu juga digambarkan dengan sifat-sifat seperti mudah puas diri, kurang inisiatif, tidak efisien dalam melakukan sesuatu, kurang menghargai waktu, kurang memiliki imajinasi dan kurang gigih dalam berusaha (Rahman, 1971). Lebih Lanjut Tabrani menjelaskan bahwa kemunduran etnis ini disebabkan oleh ciri khas kehidupan mereka yang dapat dirumuskan, antara lain : (1) Kemampuan berkompetisi pada etnis ini sangat kecil, (2) Kemiskinan adalah gambaran umum dari etnis ini, (3) Bayangan kekurangan makanan yang berkualitas, disebabkan lahannya yang gambut yang menghalang tanaman padi untuk tumbuh subur, (4) Perasaan puas terhadap hasil yang telah dicapai dan kelompok keluarga yang terikat kuat sehingga sulit berkembang, dan (5) Pola pendidikan yang tidak mengantarkan mereka menjadi tenaga yang terlatih (Rab, 1990). Berdasarkan perbedaan Fenomena dan teori tersebut, maka perlu dilakukan suatu kajian yang secara mendalam terhadap konstruksi perempuan dalam budaya melayu sehingga ditemukan struktur-sosial dan budaya terhadap perempuan pengusaha melayu. Untuk itu, penelitian ini tertarik untuk melihat bagaimana Konstruksi Perempuan dalam Budaya Melayu bagi Perempuan Pengusaha di Palembang.

Perempuan dalam Konstruksi Sosial dan Agama

Konstruksi Gender Dalam Budaya

Dalam banyak budaya tradisional, perempuan ditempatkan pada posisi yang dilirik setelah kelompok laki-laki. Fungsi dan peran yang diemban perempuan dalam masyarakat tersebut secara tidak sadar biasanya dikonstruksikan oleh budaya setempat sebagai warga negara kelas dua. Pada posisi inilah terjadi bias gender dalam masyarakat. Meski disadari bahwa ada perbedaan-perbedaan kodrati makhluk perempuan dan laki-laki secara jenis kelamin dan konstruksi tubuh, namun dalam konteks budaya peran yang diembannya haruslah memiliki kesetaraan.

Berkembangnya peradaban mestinya menyadarkan banyak kalangan bahwa asumsi yang muncul dan selalu melekat pada perempuan tidak selamanya benar, demikian juga sebaliknya. Sebab, pada kenyataan empiris banyak ditemukan kasus yang membuktikan bahwa hal tersebut tidak selamanya berlaku linier. Namun dalam kenyataannya mempergunakan analisis gender dalam relasi hubungan laki-laki dan perempuan kerap mengalami hambatan baik di kalangan laki-laki sendiri (terutama), juga di kalangan perempuan.

Berkembangnya peradaban mestinya menyadarkan banyak kalangan bahwa asumsi yang muncul dan selalu melekat pada perempuan tidak selamanya benar, demikian juga sebaliknya. Sebab, pada kenyataan empiris banyak ditemukan kasus yang membuktikan bahwa hal tersebut tidak selamanya berlaku linier. Namun dalam kenyataannya mempergunakan analisis gender dalam relasi hubungan laki-laki dan perempuan kerap mengalami hambatan baik di kalangan laki-laki sendiri (terutama), juga di kalangan perempuan.

Dalam analisisnya Fakhri (1999) mencatat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya penolakan penggunaan analisis tersebut. Pertama, mempertanyakan status perempuan identik dengan menggugat konsep-konsep yang telah mapan. Kedua, adanya kesalahpahaman tentang mengapa permasalahan kaum perempuan dipersoalkan? Ketiga, diskursus tentang relasi laki-laki perempuan pada dasarnya membahas hubungan kekuasaan yang sangat pribadi, yang melibatkan pribadi masing-masing serta menyangkut "hal-hal khusus" yang dinikmati oleh setiap individu (Fakhri, 1999).

Meski dipahami bahwa tidak semua aktivitas dapat bertukar peran antara laki-laki dan perempuan, namun menyimpang aktivitas tersebut tidak terkait dengan kondisi biologis jenis kelamin, maka sebenarnya dapat terjadi tukar peran antara jenis kelamin yang berbeda. Kondisi inilah yang tampak belum secara arif dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat kita, dan budaya pada akhirnya menguatkannya dan menjadikan sesuatu yang sakral. Hingga pada akhirnya, akan terlihat canggung tatkala ada seorang bapak yang menggendong anaknya, sementara sang ibu berjalan lenggang, atau sulit terjadi dalam teks-teks buku bahasa Indonesia dicontohkan perilaku seperti, ibu membaca koran, ayah memasak di dapur. Padahal kondisi itu telah secara

empirik ada dalam masyarakat kita, meski persentasenya belum banyak.

Pada akhirnya disadari bahwa budaya memainkan peran penting dalam konstruksi gender seseorang. Beberapa contoh hasil temuan penelitian menungkap begitu besarnya peran budaya pada konstruksi gender yang dimiliki seseorang. Sebut saja penelitian yang dilakukan oleh Maccoby dan Jacklin (1974) bahwa laki-laki lebih baik dalam bidang matematika dan tugas-tugas yang membutuhkan pemikiran sementara perempuan lebih baik dalam hal tugas-tugas yang berkaitan dengan pemahaman verbal. Perbedaan tersebut ditunjukkan setelah melalui serangkaian tes masuk pada sekolah dasar, sampai perguruan tinggi (Maccoby & Jaclin, 1974).

Merujuk pada budaya yang di Indonesia, tampak ada perbedaan peran gender antara suku bangsa yang ada. Sebagai misal beberapa suku di tanah Sumatra memposisikan perempuan begitu tinggi, sementara suku lainnya justru sebaliknya. Begitu juga yang terjadi di Jawa, Kalimantan, ataupun daerah-daerah lainnya di Indonesia. Secara umum sistem patrilineal lebih dominan dibanding matrilineal, yang secara tidak langsung memposisikan jenis kelamin tertentu memiliki konstruksi sosial yang lebih tinggi dibanding jenis kelamin lainnya. Pada giliran selanjutnya, posisi tersebut menentukan peran jenis yang akhirnya terbentuklah konstruksi gender sebagaimana saat ini ada.

Peran Perempuan Menurut Agama dan Budaya Dunia

Secara individu, perempuan dipandang sebagai *empu*, atau artinya yang dihargai ibarat *empu* dalam empu jari mengandung penguat jari, sehingga jari tidak dapat memegang teguh jika empu jarinya tidak ada. Namun pada masyarakat kraton, perempuan dmaknai tidak lebih dari *kalangenan* (nafsu birahi) laki-laki bangsawan dan harus bisa *ngudi sariro* (merawat badan) untuk memuaskan *hedonism* laki-laki bangsawan. Perempuan *priyayi* harus pandai menari sehingga dapat menghibur laki-laki, harus sopan santun dengan menggunakan bahasa (*kromo*) pada laki-laki atau suaminya. Namun, pada kenyataan bahwa peran perempuan perempuan baik secara individu maupun secara social tidak lepas dari pandangan dan interpretasi agama-agama dan budaya dunia. Tabel berikut memperlihatkan interpretasi agama dan budaya dunia terhadap perempuan.

Sejarah Agama-agama Dunia

WAKTU	TIMUR JAUH	INDIA	CINA/JEPANG
1000 SM	Judaism Moses	Hinduism	
600 SM	Zoroaster	Jainism	Toism, Lao Tse Cofucians
100 M	Cristiany		Shinto
600 M	Islam		
1500 M		Sikhism : Guru Nanak	
1900 M	Baha'I		

Pengembangan Kapasitas Ekonomi Perempuan

Pada umumnya permasalahan pengembangan pada perempuan pengusaha terdiri dari:

1. Kurangnya akses informasi pasar dan teknologi: dari berbagai penelitian dan pengamatan perempuan yang melakukan usaha atau bisnis mikro dan usaha kecil sering kali kurang mendapatkan akses pasar, yang meliputi keinginan, kebutuhan dan kesukaan konsumen yang kemudian biasanya berhubungan dengan aspek kualitas dan mutu produk yang dihasilkan dan dipengaruhi oleh teknologi yang dipergunakan. Hasil pertemuan lintas sektoral mengisyaratkan perlunya peningkatan kualitas dan perbaikan teknologi atas produk-produk UMKM. Pihak Departemen Perindustrian dan perdagangan mensinyalir dengan adanya arus globalisasi telah memanfaatkan hak intelektual sebagai komoditas. Hal ini harus dapat diantisipasi oleh Indonesia, mengingat produk-produk usaha kecil dan menengah biasanya merupakan produk-produk tradisional tapi seringkali unik dan spesifik sehingga perlu dilindungi dari praktek-praktek pencurian hak intelektual.
2. Kurangnya akses permodalan: Kelemahan UMK dalam hal permodalan, antara lain kesulitan untuk mendapatkan kredit melalui badan resmi disebabkan persyaratan-persyaratan yang dinilai perempuan seringkali terlalu berbelit dan sulit dipenuhi. Namun disatu pihak ada kelompok perempuan yang mengatakan tidak memperlmasalahkan hal tersebut asalkan ada informasi yang benar. Di pihak lain, ada pula perempuan pengusaha perempuan yang memang tidak mau melakukan pinjaman walau pun sebenarnya pengusaha sangat membutuhkan tambahan modal Hasil Studi Lembaga penelitian SMERU yang berkaitan dengan kinerja Upaya Penguatan Usaha kecil/Mikro di tingkat pusat untuk periode 2003-

2008, berhasil mengidentifikasi permasalahan antara lain kurangnya sosialisasi, terutama upaya yang dilakukan pemerintah-pelaksanaan program yang terburu-buru bahkan tanpa sosialisasi; upaya tidak berlanjut dan kapasitasnya terbatas-banyak upaya hanya bersifat simbolis, sangat terbatas baik jumlah maupun jangkauan sasaran serta tidak berkesinambungan; penunjukan lembaga pelaksana yang kurang tepat, banyak program yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas lembaga pelaksana SDM yang mengelolanya; Dampak dari kendala yang dihadapi, hal ini karena keterbatasan jangkauan sasaran; lemahnya pengawasan dari masyarakat, hal ini menyebabkan banyak upaya terhenti dan tersendat setelah ditinggalkan fasilitator/pendamping; serta otonomi Daerah, hal ini menyebabkan sulitnya instansi pusat dalam mengontrol dan memantau pelaksanaan upaya karena terputusnya link pemerintah pusat pada pemerintah kabupaten/kota.

Dari pertemuan lintas sector, khususnya dari lembaga pemberi dana permodalan, diketahui bahwa upaya lebih ditujukan kepada kelembagaan dan bukan kepada individu pengusahanya, serta membantu lembaga tersebut dalam program penghubung kepada bank. Sedangkan dari lintas sector, diketahui bahwa pemberian dana untuk modal produksi dalam jumlah kecil telah dilakukan oleh banyak instansi, baik secara langsung maupun melalui perbankan. Hal ini dibuktikan oleh pemetaan yang dilakukan oleh SMERU bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, bahwa ternyata lebih dari 80 persen upaya yang diberikan dari berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, lembaga swadaya dan donor adalah berupa bantuan permodalan.

3. Kurangnya Peningkatan Sumberdaya manusia: Meskipun dalam pembahasan lintas sector masalah peningkatan sumberdaya manusia tidak diungkapkan, dalam berbagai penelitian dan kajian kualitas sumberdaya manusia, khususnya pengusaha mikro, kecil dan menengah telah menjadi salah satu penyebab kurangnya peran perempuan dalam pembangunan. Faktor budaya menjadi salah satu kendala kurangnya pendidikan bagi perempuan, tapi di satu pihak diungkapkan bahwa perempuan juga mendapatkan pendidikan di luar sekolah

- yang tercatat dan justru banyak diperoleh perempuan dari keluarga dan masyarakat.
4. Kurangnya penataan kelembagaan dan jaringan : Hasil pertemuan lintas sektoral dan stakeholder lainnya menunjukkan kurangnya koordinasi atau tidak adanya pengembangan informasi dan jaringan diantara kelompok-kelompok perempuan atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah melalui kegiatan sektoral maupun kelompok-kelompok perempuan yang tumbuh dari bawah, sehingga perlu dilakukan advokasi, pendampiangn ataupun fasilitas terhadap penataan kelembagaan dan jaringan. Adanya berbagai kelembagaan yang dikelola perempuan seperti Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) tampaknya lebih berfungsi sebagai lembaga kemasyarakatan dan bukan untuk keperluan kegiatan ekonomi. Sedangkan IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) yang benar-benar merupakan organisasi yang berkecimpung langsung dalam kegiatan ekonomi belum sepenuhnya dapat melakukan koordinasi dengan anggota-anggota di seluruh Indonesia. Sehingga perlu adanya jaringan social antar kelompok organisasi yang dapat berfungsi tidak hanya sebagai paguyuban tetapi juga sebagai sumber informasi yang sesuai, saling mendukung dan sumber untuk bekerjasama atau usaha secara kolektif. Jaringan ini menjadi relasi saling tergantung. Jaringan ini juga diperlukan untuk penguasaan pasar.
 5. Kurang sensitifitas gender : Dari seluruh permasalahan yang ada sebenarnya yang mendasar dan harus digalakan adalah upaya pengarusutamaan gender ke seluruh lapisan masyarakat, kelompok dan golongan. Perlu disadari kesadaran gender tidak dapat sekaligus dimengerti dan sekaligus dilaksanakan oleh masyarakat. Penyadaran gender perlu waktu dan perubahan pola pikir dan tingkah laku, sehingga diperlukan kesabaran dan ketekunan untuk mengubah kultur budaya dan kebiasaan masyarakat. Sensitivitas gender berhubungan juga dengan aspek social dan lingkungan. Kondisi social perempuan harus dilihat juga dari segi kesehatan, perlindungan terhadap kekerasan, lingkungan yang mempengaruhi kehidupan perempuan, yang secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi kinerja usaha perempuan.

Memperhatikan karakteristik kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan serta arahan kebijakan dalam proses pemberdayaannya, maka pelaksanaan

pemberdayaan ekonomi perempuan hendaknya dilakukan dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pemberdayaan melalui system kelembagaan/kelompok

Keterbatasan-keterbatasan yang ada baik pada sisi individu kelompok sasaran serta proses pelaksanaan di lapangan, menjadi akan lebih efisien dan efektif apabila proses pemberdayaan perempuan dilakukan dalam struktur kelembagaan atau kelompok daripada pemberdayaan secara individual. Dalam mekanisme kelembagaan, maka masing-masing individu yang menjadi kelompok sasaran disatukan dalam wadah kelompok usaha produktif berdasarkan kriteria tertentu seperti kesamaan lapangan usaha dan kesamaan geografis. Dengan mekanisme kelembagaan ini, diharapkan akan terbangun kerjasama yang erat berdasarkan prinsip kemitraan yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan, kebersamaan dan saling percaya diantara masing-masing anggota kelompok usaha. Kelembagaan usaha produktif ini dibina dan dikembangkan secara bertahap, mulai dari pembentukan, penguatan dan kemudian pengembangan. Penguatan kelembagaan usaha produktif ini dibina dan dikembangkan secara bertahap, mulai dari pembentukan, penguatan dan kemudian pengembangan. Penguatan kelembagaan berarti menjadikan kelembagaan sedemikian rupa sehingga lembaga yang dibentuk mampu menjalankan tugas dan fungsi dasarnya dengan baik. Apabila tugas awal telah mampu dilaksanakan dengan baik, baru dilakukan pengembangan kelembagaan, baik dalam arti pengembangan fungsi dan tugasnya maupun pengembangan unit-unit kegiatannya lembaga tersebut.

b. Program pemberdayaan harus spesifik yang melatarbelakanginya. Untuk itu, agar program pemberdayaan perempuan dapat berlangsung efektif, maka muatan program pemberdayaan haruslah sesuai dengan karakteristik kondisi dan permasalahan yang dihadapi kelompok secara program. Permasalahan kelompok perempuan miskin di perkotaan, pada aspek tertentu memiliki perbedaan dengan permasalahan kelompok perempuan miskin di pedesaan. Perbedaan atau karakteristik yang khas juga ditemui dalam konteks kondisi dan permasalahan kemiskinan di kalangan perempuan petani, perempuan nelayan atau perempuan yang bergelut dalam sector industry pengolahan (baik sebagai buruh maupun

pengusaha mikro-kecil) konsekuensinya muatan program pemberdayaan perempuan tidak dapat digeneralisir, namun harus disusun secara spesifik sesuai dengan kelompok sarannya.

c. Pengembangan Kelembagaan Keuangan Mikro Tingkat Lokal

Sebagai konsekuensinya dari dianutnya system dana bergulir dalam proses pemberian bantuan modal kerja, maka akan dibutuhkan adanya kelembagaan pengelola dana bergulir tersebut guna dapat menjamin kesinambungan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana bergulir. Sesuai dengan lingkup kelompok sasaran dan besaran dana yang dikelola maka lembaga pengelola tersebut dapat berwujud lembaga keuangan mikro di tingkat lokal harus dilengkapi dengan legalitas dan struktur organisasi yang jelas. Lembaga pengelola tersebut harus dibentuk dan disesuaikan dengan budaya dan kebutuhan dari masyarakat lokal, sehingga keberadaannya akan lebih tertanam dan dihargai dalam system kemasyarakatan yang ada. Pada tahap lanjut lembaga ini dapat dikembangkan sebagai lembaga perekonoman dalam skala mikro yang dapat berfungsi seperti koperasi, BMT, bahkan BPR. Selain itu lembaga ini dapat pula menjadi tembagi bagi masyarakat untuk berkonsultasi dalam meningkatkan usaha mereka, lembaga penampung dan membantu proses pemasaran hasil produksi dan pasar, serta mediator dalam upaya pengembangan jaringan kemitraan dan pemasaran yang lebih luas.

d. Penyediaan Modal awal untuk menjalankan usaha ekonomi produktif

Pada beberapa kelompok sasaran, mungkin akan dibutuhkan bantuan pengedaan modal awal untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif. Hal ini karena kelompok sasaran benar-benar miskin dalam arti tidak memiliki barang modal yang dapat digunakan untuk memulai kegiatan usahanya (seperti kelompok buruh tani, dan lain-lain). Modal awal dapat berupa tanah, atau alat produksi.

e. Pelibatan keluarga/suami kelompok sasaran

Pada kelompok sasaran tertentu, program pemberdayaan perempuan harus memperhatikan pula keterlibatan peran keluarga dan atau suami dari pihak perempuan yang mejadi kelompok sasaran. Pihak keluarga dan suami tersebut diharapkan dapat memberkan dukungan kepada istri/keluarga yang menjadi kelompok saasaran program pemberdayaan, baik dalam wujud pemberian

motivasi dan kesempaa utuk melakukan usaha yang menghasilkan secara ekonomi, dimana hal ini mungkin merupakan sesuatu yang relative baru atau bahkan tabu di kalangan kehidupan komunitas tertentu.

- f. Keterpaduan peranserta seluruh pemangku kepentingan (Stakeholders)
Proses pemberdayaan perempuan membutuhkan adanya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) secara terpadu, baik dari unsure pemerintahan, masyarakat, LSM, dan dunia usaha. Di tingkat pemerintahan, proses ini membutuhkan dukungan lintas sektoral baik di tingkat pusat, provinsi dan kab/kota
- g. Penyediaan dan peningkatan kemudahan akses terhadap modal usaha
Sejalan dengan pemberdayaan kapasitas SDM, maka dalam tahap selanjutnya perlu diberikan modal bagi para kelompok saasaran untuk memulai menjalankan atau mengembangkan usaha ekonomi produktif yang dilakukannya. Penyediaan dan peningkatan kemudahan untuk memperoleh akses terhadap sumber permodalan sangat diperlukan mengingat masih terbatasnya dan lemahnya akses yang dimiliki pengusaha mikro kecil pada umumnya.
- h. Fasilitas bantuan permodalan untuk pemupukan permodalan wilayah
Berbagai bauran permodalan yang diberikan, hndaknya bukan merupakan dana hibah Cuma-Cuma yang selamanya akan menjadi milik kelompok sasaran yang menerimanya. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa mekanisme seperti ini cenderung menjadikan penggunaan dana tidak dapat dipertanggungjawabkan serta kurang memberikan dampak signifikan dan berkelanjutan terhadap proses perkembangan usaha ekonomi produktif. Dalam mekanisme hibah/bantuan, penerima dana cenderung bersikap kurang peduli mengenai pengelolaan dana bantuan karena dana yang diterima telah dianggap dana milik sendiri

Tradisi Entrepreneurship dalam Budaya Melayu

Dalam sejarahnya, Masyarakat Melayu dikenal sebagai bangsa pelaut dan pedagang global dengan daerah operasinya menjangkau hingga Afrika dan Eropa. Tetapi rangkaian perdagangan mereka telah telah dihancurkan oleh serikat-serikat India Timur (penjajah Baat), dan kemudian pada zaman colonial mereka dimarjinalkan dalam sector

pertanian tradisional. Dengan demikian, dalam masa yang cukup panjang mereka telah tersingkir dari arus utama dunia perdagangn. Akibatnya, etos dan budaya kewirausahaan Melayu menjadi lemah. Untuk menghadirkan kembali masyarakat Melayu di arena perdagangan dan kewirausahaan, yang diperlukan bukan hanya bantuan modal dan peluang perdagangan, tetapi lebih dari pada itu ialah agenda penyegaran dan rekonstruksi etos kewirausahaan.

Sistem ekonomi Melayu juga mengandung prinsip penyebaran kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Menurut UU. Hamidy system ekonomi Melayu sudah lama mengenal sarikat dagang, hal ini terbukti dengan berdirinya *Syarikat Dagang Ahmadi* (Asyarikatul Ahmadiyah) pada tahun 1906 di Pulau Midai kepulauan Riau yang bergerak di bidang perdagangan kopra. Jika Orang Melayu berdagang secara individual, mereka tidak akan memutar modalnya dalam jumlah yang terlalu besar, tetapi hanya memutar modal yang terbatas dan dalam mata rantai yang cukup panjang. Motif kegiatan ekonomi ini belum cukup diketahui dengan jelas, apakah mereka sengaja tidak mau melakukannya atau mereka lebih tidak mampu melakukannya, atau mereka member kesempatan kepada orang lain untuk melakukannya agar tidak terjadi monopoli dan penumpukan kekayaan yang jelas-jelas dilarang oleh agama. supaya tercapai pemerataan kesejahteraan (Hamidy, 1996). Oleh karena itu, tidak mungkin menemukan adanya pedagang atau saudagar Melayu yang menguasai seluruh mata rantai perdagangan atau menjadi konglomerat yang besar.

Selanjutnya Hamid menuturkan, bahwa matinya tradisi dagang pada orang Melayu karena adanya intervensi dari pihak colonial yang melakukan monopoli dan mempersempit pintu perdagangan serta member hak-hak istimewa kepada orang Cina. Ini adalah awal dari strategi yang diterapkan oleh pihak Belanda untuk mematikan tradisi dagang yang lebih dinamis dari kaum Melayu atau masyarakat Indonesia umumnya, dan secara perlahan mereka ditarik ke darat untuk menekuni tradisi agraris (pertanian) yang lebih statis. Dari sinilah kemunduran-kemunduran dialami oleh orang Melayu, yang akhirnya sebagian mereka memiliki karsa lemah dan berpegang kepada teologi yang cenderung memberikan legitimasi sebagai kompensasi psikologis, serta diwarisi secara turun temurun, dan oleh sebagian orang luar inilah dipandang sebagai budaya orang Melayu, padahal budaya ini sebenarnya telah banyak mengalami

perubahan dan berbeda dengan budaya atau system budaya melayu yang sebenarnya (Hasbullah, 2007).

Untuk melihat semangat entrepreneurship orang melayu secara mendalam dapat dilihat dari berbagai ungkapan yang terdapat dalam khasanah kebudayaan. Secara teoritis, perilaku suatu masyarakat dimotivasi oleh system nilai yang berlaku dan dianutnya. Orang Melayu mendasarkan budayanya dengan nilai-nilai Islam yang selalu memandang bekerja merupakan ibadah, kewajiban dan tanggung jawab. Bekerja sebagai ibadah merupakan hasil pemahaman orang Melayu terhadap al-Quran dan Hadits Nabi. Pemahaman tersebut selaras dengan ungkapan adat Melayu yang menjelaskan terhadap pandangan orang Melayu terhadap kerja:

Apa tanda orang yang beradat

Wajib bekerja ianya ingat

Kalau mengaku orang Melayu

Wajib bekerja ianya tahu

Apa Tanda orang berakal

Dalam Bekerja hatinya pukal

Apa tanda orang beriman

Bekerja keras tiada segan

Apa tanda orang berilmu

Bermalas-malas ianya malu

Ungkapan diatas mencerminkan bagaimana utamanya kedudukan kerja dalam pandangan orang Melayu. Orang yang mampu bekerja keras dianggap bertanggung jawab terhadap diri dan keluarga terhadap masyarakat, agama, adat istiadat dan norma-norma social yang mereka jadikan pegangan dan sandaran. Sebaliknya orang yang bermalas-malasan sering menjadi ejekan dalam masyarakat, seperti yang tertuang dalam pantun berikut ini:

Tak ada gunanya berbaju tebal

Hari Panas badan peluh

Tak ada gunanya Melayu bebal

Diri pemalas kerja bertanggung

Tak ada guna Kayu diukir

Bila dipakai dimakan ulat

Tak ada guna melayu pandir

Bekerja lalai makannya kuat

Apa guna merajut baju

Kalau ditetas butanngyna lepas

Apa guna disebut melayu

kalau malas bekerja keras

Dari kajian diatas dapat dipahami bahwa jiwa dan semangat entrepreneurship bagi masyarakat Melayu tertanam dalam diri setiap individu. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ungkapan pantun dan nilai kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan

Dalam pembentukan nilai pengusaha perempuan melayu terdiri dari berbagai macam tingkat pendidikan, namun dalam hal penelitian ini perempuan pengusaha yang ada memiliki tingkat pendidikan menengah keatas sehingga pembentukan nilai entrepreneurshipnya lebih terlihat jelas. Nilai entrepreneurship mereka dapatkan melalui pendidikan, pelatihan dan cenderung dari factor keturunan. Konstruksi social dalam masyarakat Melayu adalah konstruksi social yang menempatkan kaum perempuan pengusaha keturunan Melayu sebagai sosok yang mandiri dan menopang ekonomi keluarga. Konstruksi social ini terlihat dalam beberapa hal diantaranya:

- a. Nilai-nilai yang dimiliki perempuan pengusaha melayu yaitu, tekun dalam menjalankan usaha, memiliki manajemen waktu yang baik, kreatifitas yang tinggi dalam mengembangkan produk dalam usahanya serta memiliki perencanaan yang tepat.
- b. Dalam pembagian peran gender terlihat bahwa perempuan melayu tidak memiliki kendala yang berarti dalam menjalankan peranannya baik sebagai ibu maupun sebagai seorang istri sekaligus sebagai seorang pengusaha. Segala kendala dalam pembagian kerja diatasi dengan bijak diantara anggota keluarga. Diantaranya

menggantikan peran pengasuhan dengan seorang pengasuh bila berada ditempat usaha, membagi peran domestic bersama suami dan lain sebagainya.

- c. Dalam pengembangan kapasitas seorang perempuan dan pengembangan usaha, perempuan Melayu sebagian besar melakukan kapasitas mereka dengan mengikuti program pemerintah dan lembaga-lembaga yang bersifat mandiri. Dengan adanya pengembangan kapasitas maka dengan mudah perempuan melayu merumuskan stratehi pengembangan usaha. Di lain pihak ada beberapa perempuan pengusaha yang memiliki kendala dalam pengembangan kapasitas dan usaha. Salah satunya adalah tidak memiliki akses pinjaman modal usaha, tidak memiliki kesempatan dalam mengikuti pelatihan dikarenakan dominannya peranan domestic yang tidak bisa ditinggalkan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, I. (2006). *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dipta, I. W. (2009). *Mengangkat Peran Perempuan Pengusaha Dalam Mengatasi Pengangguran*. Jakarta: Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
- Fakih, M. (1999). *Analisis Gender & dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamidy, U. (1996). *Islam dan Masyarakat Melayu Riau*. Pekanbaru: UIR Press .
- Hasbulah. (2007). *Islam dan Transformasi Kebudayaan Melayu di Kerajaan Siak*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau.
- Maccoby, & Jaclin. (1974). *The psychology of sex differences*. Stanford: Standford sUniversity.
- Mangunsong, F. (2004). *Faktor intrapersonal, interpersonal, dan kultural pendukung efektivitas kepemimpinan perempuan pengusaha dari empat kelompok etnis di Indonesia*. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Depok: Universitas Indonesia.
- Nasikun. (2011). Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan : Teori dan Implikasi kebiasanaan”. *Populasi Vol.1* .
- Rab, T. (1990). *Fenomena Melayu*. Pekanbaru: Lembaga Studi Sosial Budaya Riau.
- Rahman, S. A. (1971). *Revolusi Mental*. Kuala Lumpur: Utusan Melayu.